

DAFTAR ISI
Jurnal Al Falah, Vol. XIV No. 25 Tahun 2014

1. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana
Anwar Hafidzi 1-24
2. Iklim Organisasi (Strategi Menciptakan Iklim yang Kondusif di Lembaga Pendidikan)
Imaniah Elfa Rachmah 25-50
3. Implementasi Metode Iqra' dalam Pengajaran Al-Qur'an di Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Darussalim Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
Ahmad & Syaifuddin 51-68
4. Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Anak-Anak Berkebutuhan Khusus Di SLB C Negeri Pembina Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan
Rara & Fauzan 69-80
5. Efektivitas Penggunaan Metode Iqro pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Amanah di Desa Padang Kecamatan Bati-bati
Ahmad Nor & M. Ramli 81-96
6. Fenomena Pendidikan Keberagaman pada Masyarakat RT 003/RW 001 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin
M. Alfian & Muhammad Toriqularif 97-112
7. Pendidikan Islam di Bangladesh
Surawardi 113-138

Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam
dan Pidana
Anwar Hafidzi

Iklim Organisasi (Strategi Menciptakan Iklim yang Kondusif di
Lembaga Pendidikan)
Imaniah Elfa Rachmah

Implementasi Metode Iqra' dalam Pengajaran Al-Qur'an di
Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Darussalim Kecamatan Bati-
Bati Kabupaten Tanah Laut
Ahmad & Syaifuddin

Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Anak-
Anak Berkebutuhan Khusus Di SLB C Negeri Pembina Tingkat
Provinsi Kalimantan Selatan
Rara & Fauzan

Efektivitas Penggunaan Metode Iqro pada Taman Pendidikan Al-
Qur'an (TPA) Amanah di Desa Padang Kecamatan Bati-bati
Ahmad Nor & M. Ramli

Fenomena Pendidikan Keberagaman pada Masyarakat RT
003/RW 001 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan
Ulin
M. Alfian & Muhamamad Toriqularif

Pendidikan Islam di Bangladesh
Surawardi

PENDIDIKAN ISLAM DI BANGLADESH

Oleh: Surawardi*

Abstrak

Kebijakan pendidikan Bangladesh dan Indonesia hampir sama yakni menjadikan pendidikan wajib belajar bagi warga negaranya. Hanya saja Bangladesh wajib belajarnya hingga tingkat SLTA sementara di Indonesia hanya sampai tingkat SLTP. Sementara lembaga pendidikan yang terdapat di Bangladesh serta Indonesia juga hampir sama yakni adanya lembaga pendidikan Umum dan Agama/Madrasah serta sekolah tinggi/universitas baik umum dan keagamaan.

Problematika Pendidikan di Bangladesh hampir sama dengan di Indonesia adalah masih banyaknya anak putus sekolah baik demikian pula halnya dengan di Indonesia, padahal ada undang-undang yang mengatur wajib belajar bagi anak-anak namun pihak negara belum banyak berbuat untuk melayani amanat undang undang tersebut terbukti tidak adanya *punishment* bagi orang tua yang tidak melaksanakan wajib belajar sebagaimana yang diamanatkan oleh masing-masing Undang-undang wajib belajar baik di Pakistan, Bangladesh demikian pula di Indonesia.

Penanganan pendidikan umum dan agama di Bangladesh dan Indonesia juga hampir sama yakni pemerintah, swasta dan LSM. Akan tetapi pendidikan perempuan tentu saja di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Pakistan dan Bangladesh.

*Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin dengan Keahlian Ilmu Pendidikan Islam.

Kata Kunci: Kebijakan, pendidikan, problematika dan penanganan

A. Pendahuluan

Pada Agustus 1947, pembagian India melahirkan negara baru yang disebut Pakistan. Pakistan terdiri dari wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Dalam negara Pakistan, terdapat dua wilayah yang secara geografis dan budaya terpisah, salah satunya berada di ujung barat sub benua India, sedangkan yang lainnya berada di ujung timur. Kedua wilayah ini terpisah oleh ribuan mil teritori India. Zona Barat umumnya (juga secara resmi) disebut Pakistan Barat, dan zona Timur (Bangladesh modern) disebut Benggala Timur, dan nantinya Pakistan Timur. Secara umum terlihat bahwa Pakistan Barat lebih dominan secara politik dan mengeksploitasi Timur secara ekonomi, menimbulkan banyak keluhan. Pada tanggal 25 Maret 1971, meningkatnya ketidak puasan politik dan nasionalisme budaya di Pakistan Timur menyebabkan dilakukannya operasi penekanan oleh pasukan Pakistan Barat,¹ yang brutal,² yang disebut Operasi Searchlight.³ Kekerasan oleh tentara Pakistan Barat⁴, menyebabkan pernyataan kemerdekaan Pakistan Timur sebagai negara Bangladesh dan dimulainya perang saudara. Perang ini menyebabkan pengungsi (diperkirakan sekitar 10 juta penduduk)⁵ membanjiri provinsi timur India.⁶ Karena

¹*Emerging Discontent, 1966-70*. Country Studies Bangladesh

²*Genocide in Bangladesh, 1971*. Gendercide Watch.

³*Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971: Military Action: Operation Searchlight Bose S Economic and Political Weekly Special Articles, 8 Oktober 2005*.

⁴*The Pakistani Slaughter That Nixon Ignored, Syndicated Column* by Sydney Schanberg, New York Times, 3 Mei 1994.

⁵*Crisis in South Asia - A report* by Senator Edward Kennedy to the Subcommittee investigating the Problem of Refugees and Their Settlement, Submitted to U.S. Senate Judiciary Committee, 1 November

menghadapi krisis ekonomi dan kemanusiaan, India mulai membantu dan mengorganisir grup perlawanan Bangladesh yang disebut Mukti Bahini. Meskipun penduduk Pakistan Timur merupakan mayoritas, kekuatan politik dipegang kuat oleh Pakistan Barat, terutama Punjabi. Karena sistem representasi langsung berdasarkan populasi akan memusatkan kekuatan politik di Pakistan Timur, pendirian Pakistan Barat dilakukan dengan skema "Satu Kesatuan", dengan seluruh Pakistan Barat dianggap sebagai satu provinsi. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mengimbangi suara sayap Timur. Ironisnya, setelah Timur memisahkan diri untuk membentuk Bangladesh, provinsi Punjabi meminta dengan tegas bahwa politik di Pakistan Barat kini ditentukan dengan basis suara langsung, karena Punjabi berjumlah lebih banyak dari grup lainnya, seperti Sindhi, Pashtun, atau Baloch. Setelah pembunuhan perdana menteri pertama Pakistan: *Liaquat Ali Khan* tahun 1951, kekuasaan politik mulai dipusatkan pada Presiden Pakistan, dan kadang-kadang militer.

Pakistan Timur menyadari jika salah satu dari mereka, seperti Khawaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, atau Huseyn Shaheed Suhrawardy, terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan, dengan cepat mereka akan dijatuhkan oleh Pakistan Barat. Kediktatoran militer Ayub Khan (27 Oktober 1958 – 25 Maret 1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969 – 20 Desember 1971), yang keduanya berasal dari Pakistan Barat, hanya meningkatkan perasaan seperti itu.

1971, U.S. Govt. Press. pp6-7. Lihat pula *India and Pakistan: Over the Edge*. TIME 13 Desember 1971 Vol. 98 No. 24.

⁶*Crisis in South Asia - A report* by Senator Edward Kennedy to the Subcommittee investigating the Problem of Refugees and Their Settlement, Submitted to U.S. Senate Judiciary Committee, 1 November 1971, U.S. Govt. Press. pp. 6-7.

Berbeda dengan Pakistan Barat, Bangladesh berkembang dalam arahan nasional bukan arahan Islam. Reaksi awal terhadap kemerdekaan adalah penekanan terhadap aspek kebangsaan bukan pada aspek keagamaan sebagai unsur identitas masyarakat Banglades. Konstitusi 1972 memproklamkan sekularisme sebagai prinsip dasar dan penumpasan aksi politik kelompok keagamaan; kebangkitan kalangan terdidik Bangladesh juga menekankan aspek Bengali daripada aspek keagamaan sebagai identitas nasional. Bangladesh terbentuk dengan dukungan kuat India disebabkan didalamnya terdapat sejumlah minoritas Hindu, dan lantaran keberatan India atas pengukuhan Negara Pakistan berdasarkan identitas keislaman, dan keberatan India atas pegistemewaan kelompok keagamaan untuk tetap mempertahankan kesatuan. Namun pada tahun 1977 rezim baru meliter pimpinan jenderal Zia ul-Rahman cukup mengendorokan kecaman konstitusi aktivis Muslim dan menggantikan prinsip sekularisme dengan penghargaan terhadap kepercayaan Tuhan. Namun partai nasional Bangladesh berkuasa secara mutlak berhasil mengalahkan beberapa partai Islam dalam pemilihan umum tahun 1979. Dan mempertahankan program pembangunan sekuler yang dikombinasikan dengan perasaan afiliasi agama Islam yang bersifat umum. Sekalipun demikian, upaya pemerintah Bengali tersebut belum mampu mengatasi problem pemisahan Bangladesh dari Bengal India, dan terdapat beberapa indikasi mutakhir sebuah upaya penekanan terhadap Islam. Identitas Bengali mengandung muatan aspek etnik-nasional sekaligus muatan aspek etnik-Muslim, dan banyak hal yang dapat ditekankan sehubungan dengan perubahan kondisi politik.⁷

B. Pembahasan

⁷Ira. M. Lapidus. *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 305-306.

- Maksum, Madrasah: *Sejarah & Perkembanganya*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, tth.
- Munir, Musra, Muhammad, *Al- Tarbiyah al Islamiyah; Ushuluha wa Tathawuruhu fi al-Bilad al-Arabiyah*, t.tp, A'lam al Kutub, 1977.
- Nasr, Sayyid Husain, *Spiritaulitas Islam*, Bandung, Mizan, 1993.
- Salamun, Ahmad, *Tarikh at Tarikh at Tarbiyah al Islamiyah*, Islamabad, al-Kitabah, 2004.
- Syed Abdallah, *Hayat at Tarbiyah Fina*, Islamabad, al Kitabah, 2001.
- Thohir, Ajid, *Studi Kawasan Dunia Islam, Perspektif Etno-Linguistik dan Geo Politik*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.
- Van Dozel, E. dkk (Ed), *The Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J.Brill, 1978
- Wilfred C.Smith, *Dunia Islam Moderen*, terj. Bhratara, 1979, Harun Nasotion, dan Azyumardi Azra, *Pembaharuan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang: 1982
- Zaidan, Jurji, *History of Islamic Civilization*, New Dehi: Kitab Bhavan, 1978

Azra, Azyumardi *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos wacana Ilmu, 2009.

Candice Lys "Demonizing the "other": *Fundamentalist Pakistani Madrasah and the Construction of Religious Violence*", *Marburg Journal of Religion*: Vol: 11, No. 1 (June 2006)

Farish, A. Noor, Yoginder Sikand & Martin Van Bruinessen (eds), *Tha Madrasa in Asia Political Activism and Transnational Linkages*, Amsterdam: University Press, 2007.

Imam, Musbikin, *Studi Islam Kawasan, Riau, Zanafa Publishing*, 2005.

Ikram, S. M., *Muslim Civilization in India*, New York, Colombia Universitas Press, tth.

Ishfaq, Ahmad (1998-11-21). "*CERN and Pakistan: a personal perspective*". *CERN Courier*. Retrieved 2008-02-18

Khan, Tasnim; Khan, Rana Ejaz Ali (2004). "*Gender Disparity in Education - Extents, Trends and Factors*" (PDF). *Journal of Research (Faculty of Languages & Islamic Studies)*. Retrieved 2009-03-08.

Lapidus, M.Ira., *Sejarah Umat Islam Bagian Ketiga*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997.

1. Dinamika Kelembagaan/Sistem Kelembagaan

Sistem pendidikan di Bangladesh adalah tiga-berjenjang dan disubsidi. Subsidi pemerintah Bangladesh dilaksanakan mulai dari sekolah di tingkat SD, menengah, dan tinggi. Hal ini juga mensubsidi bagian dari pendanaan bagi banyak sekolah swasta. Di sektor pendidikan tinggi, pemerintah juga mendanai lebih dari 15 perguruan tinggi negeri melalui Komisi Universitas Hibah. Bangladesh sesuai sepenuhnya dengan Pendidikan Untuk Semua (PUS) tujuan, *Millenium Development Goals (MDG)* dan deklarasi internasional. Pasal 17 dari Konstitusi Bangladesh menetapkan bahwa semua anak yang berusia antara enam dan delapan belas tahun menerima pendidikan menengah gratis.

Sistem Kelembagaan Pendidikan di Bangladesh terdiri dari tiga macam yakni: *Pendidikan Pertama* meliputi: (1) Pendidikan Tersier di Sistem Pendidikan Madrasah. (2) Pendidikan Tersier di Sistem Pendidikan Teknis. *Pendidikan Kedua* yakni *Manajemen Pendidikan* yang terdiri dari: (1) manajemen tingkat dasar dan menengah. (2) pengelolaan pendidikan tersier. (3) pengelolaan pendidikan teknis dan kejuruan serta (4) Universitas Umum. Kemudian *Pendidikan Ketiga* yakni media bahasa Inggris di Bangladesh. *Pendidikan Keempat*: pendidikan dasar non-formal. Disamping itu dikenal pula dengan Pendidikan Lingkungan.

Tiga sistem pendidikan utama di Bangladesh, diperintahkan oleh penurunan jumlah siswa, adalah: (1) Sistem Pendidikan Umum. (2) Sistem Pendidikan Madrasah. (3) Teknis - Sistem Pendidikan Kejuruan. Sistem lain termasuk Sistem Pendidikan Profesional. Masing-masing dari ketiga sistem utama ini dibagi menjadi lima tingkatan: (1) Tingkat Dasar (tahun 1 sampai 4). (2) Tingkat SMP (tahun 5 sampai 8). (3) Tingkat Menengah (tahun 9-10). (4) Tingkat Menengah Tinggi (tahun 11 dan 12). (5) Tingkat

Tersier Pendidikan tinggi di Bangladesh berlangsung di 34 pemerintah, 78 swasta dan 3 universitas internasional. Siswa dapat memilih untuk melanjutkan studinya di Chartered Akuntansi, teknik, teknologi, pertanian dan kedokteran di berbagai universitas dan perguruan tinggi. Di semua tingkat sekolah, siswa dapat memilih untuk menerima pendidikan mereka dalam bahasa Inggris atau Bangla. Sekolah swasta cenderung memanfaatkan media pembelajaran bahasa Inggris berbasis sedangkan sekolah yang disponsori pemerintah menggunakan Bangla.

Taruna di ruang kelas *Colleges Cadet* penting dalam sistem pendidikan dari Bangladesh. Sebuah sekolah kadet adalah kamar dan perguruan tinggi yang dikelola oleh Bangladesh. Disiplin militer adalah wajib di semua perguruan tinggi kadet. Faujdarhat Cadet Universitas adalah perguruan tinggi kadet pertama di Bangladesh, didirikan pada tahun 1958 di atas lahan seluas 185 hektar (0,75 km²) lahan di Faujdarhat di distrik Chittagong. Saat ini ada 12 perguruan tinggi kadet di Bangladesh, termasuk 3 perguruan tinggi kadet untuk anak perempuan. Sistem Pendidikan Madrasah berfokus pada pendidikan agama, mengajarkan semua dasar-dasar pendidikan dalam lingkungan agama. Studi agama diajarkan dalam bahasa Arab dan siswa di beberapa daerah juga melayani masjid daerah setempat. Siswa juga belajar diwajibkan oleh hukum untuk menyelesaikan semua program dari Sistem Pendidikan Umum. Banyak madrasah swasta berlisensi mengambil anak-anak tunawisma dan menyediakan mereka dengan makanan, tempat tinggal dan pendidikan, misalnya Jamia Tawakkulia Renga Madrasah di Sylhet. Teknis dan Kejuruan Pendidikan Sistem menyediakan kursus yang berkaitan dengan berbagai bidang terapan dan praktis ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa, atau berfokus pada area khusus tertentu. Durasi kursus berkisar antara satu bulan sampai empat tahun.

undang yang mengatur wajib belajar bagi anak-anak namun pihak negara belum banyak berbuat untuk melayani amanat undang undang tersebut terbukti tidak adanya *punishment* bagi orang tua yang tidak melaksanakan wajib belajar sebagaimana yang diamanatkan oleh masing-masing Undang-undang wajib belajar baik di Pakistan, Bangladesh demikian pula di Indonesia.

Penanganan pendidikan umum dan agama di Pakistan dan Bangladesh serta Indonesia juga hampir sama yakni pemerintah, swasta dan LSM. Akan tetapi pendidikan perempuan tentu saja di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Pakistan dan Bangladesh.

sendiri (Pakistan Timur ketika itu). Dorongan untuk merdeka dari Pakistan memang sangat beralasan karena jarak teritorial ribuan mil antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat (Bangladesh) yang sangat jauh sehingga kebijakan secara politik dan social dan ekonomi demikian pula agama dan budaya terjadi kesenjangan antara kedua Pakitan tersebut sehingga dengan menjadi negara sendiri (Bangladesh) tentu saja hal itu tidak akan terjadi dan Bangladesh menjadi lebih baik dalam segala hal termasuk stabilitas politik dan soial ekonomi dan pendidikan. Lainnya halnya dengan di Indonesia terbentuknya Negara RI adalah adanya semangat nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Semangat nasionalis tersebut tanpa membeda-bedakan suku agama dan bahasa sehingga Indonesia bukan negara Muslim meskipun termasuk negara mayoritas muslim terbesar di dunia.

Kebijakan pendidikan antara Pakistan dan Bangladesh dan Indonesia hampir sama yakni menjadikan pendidikan wajib belajar bagi warga negaranya. Hanya saja Pakistan dan Bangladesh wajib belajarnya hingga tingkat SLTA sementara di Indonesia hanya sampai tingkat SLTP. Sementara lembaga pendidikan yang terdapat di Pakistan dan Bangladesh serta Indonesia juga hampir sama yakni adanya lembaga pendidikan Umum dan Agama /Madrasah serta sekolah tinggi/universitas baik umum dan keagamaan.

Problematika pendidikan yang terjadi di Pakistan adalah adanya senyalemen yang mengindentifikasikan sebagian lembaga pendidikan Agama/Madrasah yang terlibat dalam gerakan teroris. Namun hal ini tidak terjadi di Bangladesh. Sementara di Indonesia juga ada terendus isu yang mengidentifikasikan hal yang serupa sebagaimana yang terjadi di Pakistan. Problematika lainnya yang hampir sama dengan di Indonesia adalah masih banyaknya anak putus sekolah baik di Pakistan dan Bangladesh demikian pula halnya dengan di Indonesia, padahal ada undang-

Pendidikan tinggi di Sistem Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Madrasah ada dua sistem yang disebut sistem *Kaumi Madras* yang merupakan sistem pendidikan Islam asli, sementara yang lain disebut "*Alia madrasah*" adalah seperti pendidikan umum, satunya perbedaan adalah mereka mengajarkan bahasa Arab sebagai tambahan untuk pendidikan umum, setelah melewati 'Alim' (12 kelas), mahasiswa dapat mendaftarkan diri di untuk 3 years studi yang panjang, untuk memperoleh tingkat 'Phazil' (14th Grade) serta mereka bisa pergi untuk pendidikan umum lebih lanjut seperti mendapatkan seluruh gelar universitas, dan setelah lewat berhasil mereka dapat lebih mendaftarkan diri ke lain 2 tahun studi sistem lama untuk mendapatkan tingkat 'Kamil' (16th Grade) derajat. Pendidikan tinggi di Sistem Pendidikan Teknis Dalam Sistem Pendidikan Teknis, setelah memperoleh gelar Diploma *-in -Engineering* (kurikulum lama empat tahun) siswa dapat lebih mengejar pembawa pendidikan mereka untuk mendapatkan gelar Sarjana dari Teknik & Teknologi Universitas, dan biasanya dibutuhkan dua setengah atau tiga tahun yang panjang kursus untuk siswa dengan gelar Diploma *-in -Engineering*, untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi sering dalam beberapa kasus siswa ini mengambil lebih dari tiga tahun untuk menyelesaikan gelar sarjana mereka (gelar sarjana) (*16th Grade*) Teknik. Kemudian mereka dapat mendaftarkan diri ke dalam studi pasca-sarjana. Siswa dapat belajar CA setelah melewati HSC atau sarjana subjek derajat memenuhi kriteria masuknya *Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB)*. manajemen pendidikan Tanggung jawab keseluruhan manajemen pendidikan dasar terletak dengan Departemen Pendidikan Dasar dan Mass (*MOPME*), diatur sebagai Menteri pada tahun 1992. Sementara *MOPME* terlibat dalam perumusan kebijakan, tanggung jawab pelaksanaan terletak

pada Direktorat Pendidikan Dasar (*DPE*) dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Pendidikan Dasar (*DPE*) dan kantor di bawahnya di kabupaten dan Upazila bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengawasan pendidikan dasar. Tanggung jawab mereka meliputi perekrutan, pengiriman, dan transfer guru dan staf lain, mengatur pelatihan in-service guru, distribusi buku teks gratis, dan pengawasan sekolah. Tanggung jawab pembangunan sekolah, perbaikan dan penyediaan peralatan sekolah terletak pada *DPE* dilaksanakan melalui *Departemen Local Government Engineering (LGED)*.

Kurikulum Nasional dan *Textbook Board (NCTB)* bertanggung jawab untuk pengembangan kurikulum dan produksi buku teks. Sementara Kementerian Pendidikan (*MOE*) bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan, Direktorat Menengah dan Pendidikan Tinggi (*Dshe*) di bawah Departemen Pendidikan bertanggung jawab untuk melaksanakan hal yang sama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. *The NCTB* bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum dan penerbitan buku teks standar. Manajemen tingkat dasar dan menengah Tingkat dasar pendidikan dikelola oleh Direktorat Pendidikan Dasar (*DPE*) sedangkan tingkat menengah pendidikan dikendalikan oleh tujuh Umum Dewan Pendidikan, masing-masing mencakup suatu daerah. Markas papan' terletak di Barisal, Comilla Chittagong, Dhaka, Dinajpur Jessore, Rajshahi dan Sylhet. Selain itu, Dewan Pendidikan Madrasah mencakup pendidikan agama di Madrasah terdaftar pemerintah, dan Dewan Pendidikan Teknik kontrol pelatihan teknis dan kejuruan di tingkat menengah. Board berbasis wilayah delapan Menengah dan Pendidikan Menengah (*Bise*) bertanggung jawab untuk melakukan empat ujian publik, Sekolah Dasar *Certificate* (juga *Primary Education* Penyelesaian Pemeriksaan) (*PSC*), *SMP Certificate* (*JSC*), Sertifikat Sekolah Menengah (*SSC*) dan

LSM di Bangladesh banyak terlibat dalam kegiatan pendidikan demikian pula dalam keterlibatan pihak swasta terutama dalam kegiatan pendidikan non formal. Demikian pula di Indonesia keterlibatan LSM dan pihak swasta sudah tidak dipunkiri lagi dalam membantu memajukan pendidikan baik umum maupun agama. Kalau di Bangladesh kebanyakan pendidikan yang di kelola swasta lebih bersifat komersial tetapi kalau di Indonesia lebih mengutamakan untuk pemenuhan pendidikan bagi masyarakat meskipun diakui memang ada sebagian yang mengkomersilkan pendidikan namun ini sangat kecil. Akan tetapi LSM di Bangladesh sangat maksimal dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan masyarakat pinggiran dan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Berkaca dari keadaan ini semestinya LSM di Indonesia juga lebih memperhatikan dari kepentingan pendidikan pada masyarakat pinggiran dan miskin yang terdapat di pedesaan dan daerah terpencil. Karewna berdasarkan data kependidikan yang ada di Kementrian Pendidikan nasional dan Kementrian Pendidikan Agama RI, lembaga pendidikan yang digerakkan oleh SLM masih terpusat pada masyarakat miskin perkotaan.

C. Simpulan

Akar sejarah terbentuknya pemerintahan pakistan adalah adanya semangat keagamaan yang kuat atas pengaruh mayoritas Hindu yang terdapat di India sehingga akhirnya terlahirlah negara Pakistan yang mengatasnamakan negara Islam Pakistan dan secara resmi disebutkan pada Undang-Undang Pemerintahan pakistan. Berbeda dengan Bengladesh yang merdeka atas dasar politik nasionalis yang ingin hidup lebih baik dan lebih layak jika berdiri sendiri tanpa harus terikat dengan Pakistan Barat (Pakistan ketika itu). Maka berdirilah negara Bangladesh yang merdeka dan berdiri

standar. Manajemen tingkat dasar dan menengah Tingkat dasar pendidikan dikelola oleh Direktorat Pendidikan Dasar (DPE) sedangkan tingkat menengah pendidikan dikendalikan oleh tujuh Umum Dewan Pendidikan, masing-masing mencakup suatu daerah. Markas papan' terletak di Barisal, Comilla Chittagong, Dhaka, Dinajpur Jessore, Rajshahi dan Sylhet. Berkaca dari kasus ini di Indonesia juga masalah kurikulum dan produksi buku teks ajar ditangani secara nasional oleh kementerian pendidikan nasional dan kementerian Agama. Bedanya adalah kalau di Bangladesh hanya ditangani oleh kementerian pendidikan (MOE). Demikian juga seluruh kebijakan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi semuanya diatur oleh kementerian pendidikan. Di Indonesia masing-masing kebijakan juga diatur oleh kementerian pendidikan nasional dan kementerian Agama.

Untuk mengatur dan menjamin pembelajaran yang lebih baik di Bangladesh dikenal adanya persatuan guru yang dikenal dengan istilah *Asosiasi Guru Parent (POMG)*, di Indonesia juga dikenal dengan istilah PGRI dan IGI. Organisasi ini bedanya adalah lebih menekankan kepada pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban sebagai seorang guru. Kemudian juga tidak luput mengupayakan adanya perbaikan kinerja guru di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru-guru. Kedepannya kalau melihat dari pengalaman POMG yang terdapat di Bangladesh semestinya PGRI dan IGI tidak hanya sekedar banyak memperjuangkan hak dan kewajiban guru-guru akan tetapi yang lebih esensi lagi adalah bahwa PGRI dan IGI memiliki kekuatan hukum dalam rangka mengadakan pelatihan dan pembinaan serta peningkatan profesionalisme guru yang selama ini di Indonesia dikendalikan oleh LPPI, Balai Diklat atau LPTK yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan PGRI dan IGI.

Sertifikat Sekolah menengah Tinggi (*HSC*), selain pemberian penghargaan kepada sekolah menengah non-pemerintah. Di tingkat sekolah, dalam kasus sekolah menengah non-pemerintah, Komite Manajemen Sekolah (*SMC*), dan di tingkat perguruan tinggi menengah, dalam kasus perguruan tinggi non-pemerintah, Pemerintahan Badan (*GB*), dibentuk sesuai arahan pemerintah, bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya, menyetujui anggaran, mengendalikan pengeluaran, dan mengangkat dan mendisiplinkan staf. Sementara guru-guru sekolah menengah non-pemerintah yang direkrut oleh *SMCs* prihatin mengamati aturan pemerintah terkait, guru sekolah menengah pemerintah direkrut secara terpusat oleh Dshe melalui pemeriksaan yang kompetitif. Di sekolah menengah negeri, tidak ada suatu *SMC*. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk menjalankan sekolah dan diawasi oleh wakil direktur zona masing-masing.

Asosiasi Guru Parent (POMG), memastikan pengajaran dan pembelajaran lingkungan yang lebih baik. Manajemen pendidikan tersier Informasi lebih lanjut: Universitas di Bangladesh Lihat juga: Daftar universitas di Bangladesh Pintu masuk, Universitas Islam Teknologi (IUT). IUT adalah satu-satunya universitas internasional, didukung dengan memberikan pendidikan teknik OKI di Bangladesh. Teknik Sipil departemen BUET. BUET dianggap sebagai salah satu universitas terbaik untuk pendidikan teknik di Bangladesh Academic Building D, sust. Sust adalah salah satu ilmu pengetahuan dan teknologi universitas terbesar di Sylhet. Pada tingkat tersier, universitas diatur oleh Komisi Universitas Hibah.

Perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan tinggi berada di bawah Universitas Nasional. Masing-masing perguruan tinggi medis berafiliasi dengan universitas publik. Universitas di Bangladesh adalah badan otonom

yang dikelola oleh badan hukum seperti Syndicate, Senat, Dewan Akademik, dll sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tindakan masing-masing. Manajemen pendidikan teknis dan kejuruan. Direktorat Pendidikan Teknik (DTE) bertanggung jawab untuk perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pendidikan teknis dan kejuruan di negara ini. Kurikulum dilaksanakan oleh BTEB. Universitas Teknik Terbaik di Bangladesh: *Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka Bangladesh University of Tekstil, Dhaka Ahsanullah Universitas Sains dan Teknologi, Dhaka Universitas Islam Technology, Gazipur Khulna University of Engineering and Technology, Khulna Rajshahi University of Engineering and Technology, Rajshahi Chittagong University of Engineering and Technology, Chittagong Militer Institut Sains dan Teknologi Shahjalal Universitas Sains dan Teknologi, Sylhet Patuakhali Sains dan Teknologi Universitas, Patuakhali Universitas General Purpose* Beberapa universitas menyediakan Arts, Ilmu Murni, *Commerce* serta mata pelajaran Teknik. Empat universitas negeri tertua dan terbesar adalah: *University Of Dhaka (1921) Universitas Chittagong (1966) Universitas Rajshahi Jahangir Nagar University, Savar, Dhaka Teknik Universitas* adalah: *Bangladesh Universitas Teknik & Teknologi, BUET Bangladesh University of Tekstil Teknik Colleges of Bangladesh: Sylhet Teknik Universitas Mymensingh Rekayasa College. Begumgonj Tekstil Teknik College, Noakhali Pabna Tekstil Teknik Universitas Bangladesh College of Leather Rekayasa dan Teknologi* Ada juga sejumlah perguruan tinggi swasta di Bangladesh. Pendidikan menengah bahasa Inggris di Bangladesh.

Sejumlah besar sekolah di Bangladesh adalah sekolah bahasa Inggris Medium. Sekolah bahasa Inggris Medium terutama sekolah swasta di mana semua pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggris kecuali satu Bengali Bahasa subjek pada tingkat biasa (*O Level*). Sekolah-sekolah ini di

ditambah dengan pengetahuan Bahasa arab, Alqur'an Hadits, Aqidah Akhlak, fiqih serta SKI.

Manajemen pendidikan Tanggung jawab keseluruhan manajemen pendidikan dasar terletak dengan Departemen Pendidikan Dasar dan Madrasa. Bertanggung jawab pelaksanaan terletak pada Direktorat Pendidikan Dasar (DPE) dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Pendidikan Dasar (DPE) dan kantor di bawahnya di kabupaten dan Upazila bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengawasan pendidikan dasar. Tanggung jawab mereka meliputi perekrutan, pengiriman, dan transfer guru dan staf lain, mengatur pelatihan in-service guru, distribusi buku teks gratis, dan pengawasan sekolah. Tanggung jawab pembangunan sekolah, perbaikan dan penyediaan peralatan sekolah terletak pada DPE dilaksanakan melalui *Departemen Local Government Engineering (LGED)*.

Dilihat dari sistem manajemen Pendidikan di Indonesia maka tanggung jawab pendidikan di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Bangladesh sebagaimana yang dipaparkan di atas. Di Bangladesh sepertinya hanya satu Departemen yang mengatur pelaksanaan pendidikan yang meliputi pendidikan umum dan Madrasah sedangkan di Indonesia ada dua Departemen yakni Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional.

Kurikulum Nasional dan *Textbook Board (NCTB)* bertanggung jawab untuk pengembangan kurikulum dan produksi buku teks. Sementara Kementerian Pendidikan (*MOE*) bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan, Direktorat Menengah dan Pendidikan Tinggi (*Dshe*) di bawah Departemen Pendidikan bertanggung jawab untuk melaksanakan hal yang sama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. *The NCTB* bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum dan penerbitan buku teks

swasta berlisensi mengambil anak-anak tunawisma dan menyediakan mereka dengan makanan, tempat tinggal dan pendidikan, misalnya *Jamia Tawakkulia Renga Madrasah di Sylhet*. Teknis dan Kejuruan Pendidikan Sistem menyediakan kursus yang berkaitan dengan berbagai bidang terapan dan praktis ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasa, atau berfokus pada area khusus tertentu. Durasi kursus berkisar antara satu bulan sampai empat tahun. Dilihat dari sistem ini yang membedakannya adalah bahwa studi islam di Madrasah di Indonesia tidak semuanya menggunakan kitab berbahasa Arab terkecuali yang bercirikan pondok pesantren. Sisi persamanya adalah dimana Madrasah sama-sama mengajarkan Ilmu agama dan Ilmu Umum yang setara kepentingannya dan keutamaannya. Oleh karena itu dari aspek ini semestinya semua madrasah yang ada di Indonesia sudah semestinya menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa pendidikan baik dalam pengantar pembelajaran maupun literatur yang dijadikan pegangan sebagaimana yang dilakukan oleh Madrasah-Madrasah yang di Bangladesh.

Pendidikan tinggi di Sistem Pendidikan Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Madrasah ada dua sistem yang disebut sistem Kaumi Madras yang merupakan sistem pendidikan Islam asli, sementara yang lain disebut "Alia madrasah" adalah seperti pendidikan umum, satunya perbedaan adalah mereka mengajarkan bahasa Arab sebagai tambahan untuk pendidikan umum, setelah melewati 'Alim' (kelas 12). Dilihat dari sistem pendidikan ini sepertinya ada kesamaannya dengan pendidikan yang juga dilaksanakan di Indonesia yakni sistem Kaumi Madras yang merupakan sistem pendidikan Islam asli hampir sama dengan sistem pendidikan *Diniyah* yang dilaksanakan di Indonesia hingga tingkat *Ma'had Aly*. Sementara Alia madrasah memiliki kesamaan dengan MA yang juga dilaksanakan di Indonesia yang hampir sama dengan mengajarkan ilmu umum

Bangladesh mengikuti *General Certificate of Education (GCE)* silabus mana siswa dipersiapkan untuk mengambil Tingkat Ordinary mereka (O Level) dan Tingkat Lanjutan (Tingkat A) pemeriksaan. *The General Certificate of sistem Pendidikan* merupakan salah satu kualifikasi yang paling diakui secara internasional, berdasarkan dari Inggris. Pemeriksaan Biasa dan Tingkat Lanjutan adalah Inggris setara dengan Sekolah Menengah *Certificate (SSC)* dan Sekolah Tinggi *Certificate Secondary (HSC)* pemeriksaan masing-masing. Kebanyakan siswa mengikuti ujian ini dari sekolah-sekolah yang terdaftar di Bangladesh yang mengikuti silabus *GCE*. Mereka yang tidak menghadiri sekolah yang mengikuti silabus *GCE* juga dapat duduk Biasa dan Tingkat Lanjutan pemeriksaan mereka dari British Council. Pemeriksaan ini dilakukan di bawah pengawasan dari British Council di Bangladesh. The pemeriksaan *GCE* dilakukan oleh British Council berlangsung dua kali setahun. Saat ini ada dua papan yang beroperasi dari Bangladesh untuk Ordinary dan Tingkat Lanjutan Pemeriksaan, yang *Edexcel dan University of Cambridge International Examinations*.⁸

Pendidikan dasar non-formal yang terdapat sejumlah besar LSM yang dikelola sekolah non-formal, katering terutama untuk drop-out dari pemerintah dan sekolah dasar non - pemerintah. Sangat sedikit LSM, bagaimanapun, memberikan pendidikan untuk lima tahun siklus pendidikan dasar penuh. Karena itu, pada saat penyelesaian dua-tiga tahun pendidikan dasar non-formal mereka di LSM yang dikelola sekolah, siswa biasanya masuk kembali ke pemerintah/sekolah dasar non - pemerintah di kelas yang lebih tinggi. Ada Sekolah *Non -Governmental (NGO)* dan

⁸Jump up ^ "O level - GCE - Exams - British Council - Bangladesh". British Council. Retrieved 2013-10-25.

Pusat Pendidikan *Non Formal (PNF)* dan banyak di antaranya didanai oleh pemerintah. Program pendidikan non formal terbesar adalah banyak program yang terkenal. Namun, semua lulusan lembaga pendidikan non formal tidak melanjutkan ke sekolah menengah. LSM yang dikelola sekolah berbeda dari sekolah swasta non - pemerintah lainnya. Sedangkan sekolah swasta beroperasi seperti perusahaan swasta sering dipandu oleh kepentingan komersial, sekolah LSM beroperasi terutama di daerah yang tidak dilayani baik oleh pemerintah maupun sekolah swasta, pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari kelompok rentan di masyarakat. Mereka biasanya mengikuti pendekatan informal untuk memenuhi kebutuhan khusus anak-anak dari kelompok-kelompok rentan. Namun saat ini, beberapa sekolah beroperasi ke tempat-tempat sekolah swasta dan pemerintah.

Gaya manajemen berbeda tergantung pada perbedaan kebijakan yang ditempuh oleh LSM yang berbeda. Beberapa terpusat dalam sangat birokratis set-up, sementara yang lain menikmati otonomi yang cukup. LSM yang berbeda mengejar kebijakan yang berbeda mengenai perekrutan guru. Beberapa menyiapkan panel calon guru atas dasar tes dan merekrut guru yang ketat dari panel ini. LSM lain merekrut guru lebih informal dari peminatnya tersedia secara lokal. Status saat ini. Bagian ini membutuhkan ekspansi. Proyek pemerintah saat ini untuk mempromosikan pendidikan anak-anak di Bangladesh termasuk pendidikan dasar wajib untuk semua, pendidikan gratis untuk anak perempuan sampai kelas 10, tunjangan bagi siswa perempuan, sistem pendidikan yang terintegrasi secara nasional dan gerakan literasi makanan - untuk - pendidikan. Sebuah bagian besar dari anggaran nasional negara itu disisihkan untuk membantu menempatkan program ini ke dalam tindakan dan untuk mempromosikan pendidikan dan membuatnya lebih mudah diakses.

yang dilaksanakan dalam bentuk lembaga-lembaga kursus, pelatihan dan sebagainya. Kedepannya kalau berkaca dari aspek ini karena bahasa Inggris merupakan bahasa dunia Internasional dan generasi muda Indonesia tidak gagap bahasa Inggris meskipun semua lembaga pendidikan di Indonesia mulai dari TK hingga perguruan tinggi sudah memulai menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar proses pembelajaran yang tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan lembaga pendidikan tersebut berada.

Tiga sistem pendidikan utama di Bangladesh, diperintahkan oleh penurunan jumlah siswa, adalah: (1) Sistem Pendidikan Umum. (2) Sistem Pendidikan Madrasah. (3) Teknis - Sistem Pendidikan Kejuruan. Sistem lain termasuk Sistem Pendidikan Profesional. Masing-masing dari ketiga sistem utama ini dibagi menjadi lima tingkatan: (1) Tingkat Dasar (tahun 1 sampai 4). (2) Tingkat SMP (tahun 5 sampai 8). (3) Tingkat Menengah (tahun 9-10). (4) Tingkat Menengah Tinggi (tahun 11 dan 12). (5) Tingkat Tersier (tahun 13-18). Yang membedakan dengan di Indonesia adalah usia 1-5 tahun masih masuk usia TK (Taman kanak-kanak) sementara di Bangladesh disebut dengan Tingkat dasar. Kemudian adanya istilah tingkat (5) Tersier (13-18 tahun), Dengan demikian dapat dipahami bahwa di Indonesia hanya mengenal tingkatan pendidikan baik umum atau agama dalam level yang sama ini yakni TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA

Sistem Pendidikan Madrasah di Bangladesh berfokus pada pendidikan agama, mengajarkan semua dasar-dasar pendidikan dalam lingkungan agama. Studi agama diajarkan dalam bahasa Arab dan siswa di beberapa daerah juga melayani masjid daerah setempat. Siswa juga belajar diwajibkan oleh hukum untuk menyelesaikan semua program dari Sistem Pendidikan Umum. Banyak madrasah

SMP/MTs saja. Semestinya Indonesia juga mewajibkan wajib belajar 12 tahun hingga SLTA, bahkan hingga ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sebagaimana yang terjadi di Bangladesh dimana ada beberapa perguruan tinggi Pemerintah dan swasta yang disubsidi pemerintah dengan bea pemerintah. Ini berarti mereka yang berstudi pada sekolah tersebut digratiskan dari biaya pendidikan. Refleksi dari situasi dan kebijakan pendidikan yang terjadi di Bangladesh ini sebenarnya dapat dilaksanakan di Indonesia karena baik secara geografis dan geologis Indonesia lebih banyak memiliki kekayaan alamnya dibandingkan dengan Bangladesh tinggal kemauan dari pemimpin sekarang untuk meningkatkan anggaran pendidikan dari 20 % menjadi 30 % sehingga Indonesia merupakan Negara yang tidak ketinggalan dengan dengan Bangladesh dari segi perhatiannya terhadap kemajuan pendidikan.

Sistem Kelembagaan Pendidikan di bangladesh terdiri dari tiga macam yakni: *Pendidikan Pertama* meliputi: (1) Pendidikan Tersier di Sistem Pendidikan Madrasah. (2) Pendidikan Tersier di Sistem Pendidikan Teknis. *Pendidikan Kedua yakni Manajemen Pendidikan* yang terdiri dari: (1) manajemen tingkat dasar dan menengah. (2) pengelolaan pendidikan tersier. (3) pengelolaan pendidikan teknis dan kejuruan serta (4) Universitas Umum. Kemudian *Pendidikan Ketiga* yakni media bahasa Inggris di Bangladesh. *Pendidikan keempat*: pendidikan dasar non-formal. Disamping itu dikenal pula dengan Pendidikan Lingkungan. Melihat dari sistem ini juga tidak jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia bedanya adalah adanya pendidikan resmi pemerintah yang masih mengkomodir yang namanya media pendidikan bahasa Inggris. Kemudian di Banglades mengakui pendidikan jenis keempat adalah pendidikan non formal maka di indonesia juga diakui adanya jalur pendidikan ini dengan nama jalur pendidikan non formal

Beberapa tahun terakhir telah melihat upaya peningkatan dari sistem pendidikan Bangladesh. Sistem pendidikan Bangladesh menghadapi beberapa masalah. Di masa lalu, pendidikan Bangladesh adalah terutama dimodelkan kelas atas urusan Inggris dengan semua program diberikan dalam bahasa Inggris dan sangat sedikit yang dilakukan untuk masyarakat umum. The Bangladesh dewan pendidikan telah mengambil langkah-langkah untuk meninggalkan praktek-praktek seperti di masa lalu dan melihat ke depan untuk pendidikan sebagai cara untuk menyediakan negara miskin dengan masa depan yang cerah.

2. Problematika Pendidikan Islam di Bangladesh

Bangladesh memiliki salah satu tingkat melek huruf terendah di Asia Selatan. Satu studi menemukan tingkat 15,5% sekolah dasar ketidakhadiran guru.⁹ Kinerja yang rendah dalam pendidikan dasar juga masalah yang memprihatinkan. Tingkat sekolah *drop-out* dan tingkat pengulangan kelas tinggi.¹⁰ Kehadiran sekolah yang buruk dan waktu kontak rendah di sekolah adalah faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat prestasi belajar. Selanjutnya, sistem tidak memiliki sistem penyebaran suara Pengembangan Sumber Daya Manusia dan¹¹ dan ini telah demoralisasi personil sektor pendidikan dasar, termasuk guru, dan berkontribusi terhadap kinerja yang buruk. Kemiskinan adalah ancaman besar bagi pendidikan dasar.

Di Bangladesh, pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Jumlah kursi yang tersedia di perguruan tinggi

⁹Jump up ^ "Roll Call: Teacher Absence in Bangladesh". Site resources.world bank.org. 2004. Retrieved 2013- h. 10-25.

¹⁰Jump up ^ "Unesco Institute for Statistics". Stats.uis.unesco.org. Retrieved 2013- h. 10-25.

¹¹Jump up ^ Seders Upali M, (2000), *Institutional Capacity Building Through Human Resource Development, Directorate of Primary Education/PEDPQI Project of NORAD, Bangladesh.*

kurang dari jumlah siswa yang ingin mendaftar, dan jumlah kursi yang tersedia di perguruan tinggi juga kurang dari jumlah siswa yang lulus tingkat menengah lebih tinggi dan ingin bergabung dalam universitas. Selain itu, biaya pendidikan meningkat dari hari ke hari, akibatnya banyak siswa tidak mampu membelinya. Pendidikan lingkungan Informasi lebih lanjut: Pendidikan Lingkungan. Hal ini sangat penting untuk mengatasi kebodohan dan pola pikir generasi sekarang mengenai isu perubahan iklim yang dihadapi bangsa. Pengetahuan tertentu perlu ditanamkan dalam diri pemuda melalui pendidikan standar yang lebih baik di negara yang sudah berjuang dengan buta huruf dan dengan memberikan pendidikan dasar kepada massa. Fokus utama harus ditempatkan pada perguruan tinggi dan kurikulum tingkat universitas seperti yang dipromosikan oleh Konferensi Stockholm tahun 1972 sebagai Pendidikan Lingkungan (EE) melalui PBB. UNESCO dan UNEP bersama International Program Pendidikan Lingkungan (IIEP) didirikan tiga tahun kemudian untuk memimpin proses. Pada tahun 1992, KTT Rio mengadopsi Agenda 21 sebagai cetak biru tindakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Bab ketiga puluh enam dari agenda yang sama dikhususkan untuk mempromosikan pendidikan, kesadaran masyarakat dan pelatihan. Komponen pendidikan ini berkisar dari pendidikan formal terstruktur untuk sesekali, pelatihan kejuruan informal dan program. Fokus terus berubah dari analisis sintesis sehingga sangat penting bagi setiap orang untuk memahami implikasi dari perubahan iklim global dan bagaimana keputusan dan tindakan mereka mempengaruhi lingkungan mereka. Namun, Bangladesh mengalami masalah serius dalam pelaksanaannya. Meskipun berbagai perguruan tinggi telah membuka Environmental Science Departemen sejak tahun 1990-an dan Khulna University adalah universitas publik pertama untuk memulai program Sarjana Ilmu Lingkungan pada tahun 1997. UNDP

mendukung program ilmu lingkungan holistik dan komprehensif sebagai Berkelanjutan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup di berbagai tingkatan sekolah. Hambatan utama adalah kurangnya kesadaran para orang tua, yang akibatnya mempengaruhi tingkat kesadaran siswa. Kadang-kadang, bahkan guru tidak berafiliasi dengan umum know-how. Sebagian besar program bukan kurikulum standar tidak pula mereka sampai tanda dengan tingkat yang diperlukan. Blok lain jalan utama adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dan tidak adanya senior, berpengalaman profesional lingkungan, pendidik dan tenaga lainnya.¹² Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah belum maksimalnya pendidikan terhadap perempuan karena faktor kultur dimana peran perempuan lebih banyak untuk pengasuhan anak di rumah.¹³

3. Refleksi (Relevansi dengan Pendidikan Islam di Indonesia)

Kebijakan pendidikan yang dilakukan di Bangladesh banyak memiliki kesamaan dengan di Indonesia diantaranya adalah adanya kebijakan pemerintah untuk mewajibkan wajib belajar bagi anak yakni Pasal 17 dari Konstitusi Bangladesh menetapkan bahwa semua anak yang berusia antara enam dan delapan belas tahun menerima pendidikan menengah gratis. Bagi Indonesia juga dikenal dengan Undang- Undang Wajar bagi anak usia antara 6 hingga 15 tahun. Ini berarti bedanya dengan di Bangladesh adalah mereka memberi pendidikan gratis hingga tingkat menengah atas atau SMA/MA di Indonesia cuma sampai tingkat

¹²Jump up ^ Sunny, Sanwar (2011). *Green Buildings, Clean Transport and the Low Carbon Economy: Towards Bangladesh's Vision of a Greener Tomorrow*. Germany: LAP Publishers. ISBN 978-3-8465-9333-2.

¹³Maksum, *Madrasah; Sejarah & Perkembangannya*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, tth), h. 44.